**BAB I   
PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-orgaisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury,2003).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK,2009). Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Laporan Keuangan Pemerintahan memiliki fungsi yang sangat vital Salah satu fungsinya adalah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintahan dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005: KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasiakuntansi agar dapat memenuhitujuannya, prasayarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyususnan laporan keuangan terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadi kurangnya pemahaman/penguasa aparatur satuan kerja perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Ketidakpahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetesi pegawai negeri sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam penjabaran. Pada dasarnya pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapaianya transparansi dan akuntabilitas.

Sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangannya, membantu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan dimanfaatannya teknologi, informasi yang didapatkan diharapkan dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam mengidentifikasikan suatu masalah, menyelesaikan masalah dan mengevaluasinya, sehingga informasi yang didapatkan haruslah sebuah informasi yang berkualitas. Sistem informasi dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timely*), akurat (*accurate*), dan dapat terpercaya (*reliable*) (widjajanto, 2011).

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagi tujuan yang luas. Tujuan tesebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian sistem pengendalian intern merupakan *fondasi governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidaksahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD (Sukmaningrum,2012).

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Opini LKPD PadaTingkat Kabupaten**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LKPD (Tahun)** | **Opini** | | | | | | | | **Jumlah** |
| **WTP** | **%** | **WDP** | **%** | **TW** | **%** | **TMP** | **%** |
| 2011 | 36 | 9% | 268 | 67% | 6 | 2% | 89 | 22% | 92 |
| 2012 | 72 | 18% | 256 | 64% | 6 | 1% | 67 | 52% | 90 |
| 2013 | 105 | 26% | 241 | 61% | 11 | 3% | 41 | 10% | 398 |
| 2014 | 169 | 44% | 188 | 50% | 4 | 1% | 18 | 5% | 379 |
| 2015 | 215 | 55% | 144 | 37% | 4 | 1% | 30 | 7% | 393 |

**(Sumber :LHPS 1 Tahun 2016)**

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas mengenai perkembangan opini LKPD di tingkat kabupaten tahun 2011-2015, diketahui bahwa opini LKPD pada tahun 2011 yang diberikan kepada 92 LKPD, tahun 2012 kepada 90 LKPD, tahun 2013 kepada 398 LKPD dan 2014 kepada 379 LKPD, tahun 2015 kepada 393 LKPD.

Ikhtisar Hasil Pemerintahan Semester (LHPS) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester 1 tahun 2016, Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI) mengungkapkan 6.150 permasalahan SPI tersebut meliputi 2.315 (38%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan seperti permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, aset tetap berupa jaringan irigasi dan aset tetap peralatan mesin tidak dilengkapi dengan perincian informasi pendukung yang jelas dan lengkap, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan dan sistem informasi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

Kelemahan pada sistem pengendalian anggaran pendapatan dan belanja sebesar 2.430 (40%) penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, perencanaan kegiatan tidak memadai. Sedangkan pada kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 1.405 (22%) satuan pengawas intern tidak optimal menjalankan tugas dan fungsinya, pemkab tidak memiliki satuan pengawas intern, dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. Secara umum, permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.

Permasalahan terjadi,menunjukan para pejabat/Pelaksanaan yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan tidak relevan pada laporan keuangan tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan tidak andal dalam penyajian dan tidak jujur, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, belum membuat kebijakan/prosedur untuk suatu kegiatan operasional, serta adanya kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.

SUBANG- Opini disclaimer atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang didapat Pemkab Subang dari BPK RI dua kali berturut-turut 2014 dan 2015, terus menuai sorotan publik. Terlebih, penilaian disclaimer 2014 ternyata membuktikan adanya dugaan korupsi keuangan daerah pada anggaran BPJS senilai Rp 40 miliar. Saat ini, praktik korupsi tersebut masih diusut Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah menyeret Bupati Subang Ojang Sohandi, bersama beberapa pejabat pemkab serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, menjadi tersangka. Dua kali disclaimerini sangat disesalkan. Itu mengindikasikan persoalan di tubuh pemkab sudah pada titik nadir. Sehingga, perlu ada perbaikan, pembenahan komprehensif dalam tubuh birokrasi, agar nantinya pemerintahan menjadi clean (bersih).

Pada LKPD 2014, penilaian disclaimer dikeluarkan BPK karena menemukan indikasi penyimpangan keuangan daerah, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Sedangkan pada LKPD 2015, opini disclaimer disebabkan buruknya sistem administrasi pelaporan keuangan dan persoalan tatakelola (penatausahaan) aset daerah yang kurang baik.   
Menurutnya, kendati pada disclaimer 2015 tidak ditemukan potensi kerugian keuangan negara, tetapi, penatausahaan aset dan administrasi pelaporan yang bermasalah, menunjukkan adanya kinerja yang buruk di lingkup birokrasi pemkab. SKPD-SKPD yang kinerja nya kurang baik, sebaiknya cepat dievaluasi, dibenahi secara menyeluruh. Dengan menempatkan personel-personel yang bersih dan berkemampuan. Sebelumnya diberitakan, Pemkab Subang kembali meraih penilaian disclaimer yang kedua kalinya dari BPK untuk LKPD 2015(Irwan)

Terdapat kelemahan yang disajikan dalam laporan keuangan pada kabupaten subang seperti keterandalan pada laporan keuangan. keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut bener atau valid karena penyampaian laporan keuangan harus sesuai dengan karakteristik kualitatif informasi seperti keterandalan ketepat waktuan, jujur dalam penyajian, dan memiliki manfaat. (Fadilla,2013). mengingat bahwa keterandalan merupakan unsur kualitas informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan. dan terdapat pada sistem pengandilan intern (SPI) masih lemahnya pengawasan didalam instansi tersebut sehingga mengakibatkan banyaknya tindakan kecurangan-kecurangan yang terjadi oleh aparat pemerinatahan.

**Tasikmalaya,** Laporan keuangan Pemkot Tasikmalaya tahun 2011 yang pemeriksaannya dilakukantahun 2012 dinilai buruk, tidak jelas dan ambradul, Sejak dimekarkannya pemerintahan di Tasikmalaya menjadi Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya, laporan keuangan Pemkot Tasikmalaya setiap tahunnya dinilai buruk, tidak pernah mendapat penilaian ‘WajarTanpaPengecualian’ (WTP) di DPRD setempat setiap laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya setiap tahunnya sangat buruk, dalam artian tidak pernah tansparan dalam segala bidang. kata anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PartaiGolkar, H. NurulAwalin.

Pada tahun 2008, laporan keuangan Pemkot Tasikmalaya mendapat predikat “Disclaimer” atau tidak bias diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat amburadulnya system administrasi pelaporan keuangan. Berbeda dengan laporan daerah lain di wilayah Priangan Timur, seperti Pemkot Banjar yang selalu mendapat penilaian Wajar Tanpa pengecualian (WTP) sejak daerah ini dimekarkan, kata Nurul. Seharusnya, Pemkot Tasikmalaya berupaya keras meningkatkan upaya pelaporan keuangan sehingga kepercayaan publik meningkat. Dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkot Tasikmalaya tahun 2011, terdapat sejumlah laporan yang mengagetkan publik, yaitu sisa kas pada Bendahara Pengeluaran tahun 2011 terlambat disetor sebesar Rp 2.758.781.534. Anehnya, ada kas tekor pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya sebesar Rp 140.827.700, kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp 221.214.800 dan kelebihan pembayaran Honor Kegiatan Kunjungan Kerja/Dialog/Nara Sumber Diklat sebesar Rp 28.875.000, termasuk kegiatan lembur sebesarRp 59.650.000.

Permasalahan lainnya pembayaran ganda atas jasa pelayanan RSUD Kota Tasikmalaya sebesar Rp 52.997.975, juga sebanyak 346 titik reklame terpasang tidak berizin dan potensi pendapatan pajak reklame sebesar Rp 193.565.901 belum dapat direalisasikan. Selain temuan-temuan tersebut, masih banyak temuan lainnya yang akhirnya membuat BPK memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian bagi

pengelolaankeuangan di PemkotTasikmalaya.Target penilaianbaikatau “WajarTanpaPengecualian” untuklaporankeuangan 2012 menjadi target, meski akhir jabatan tinggal tiga bulan lagi. Pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dibentuk Tim Pelaporan Keuangan yang diketuai Sekretaris Dinas masing-masing. **(hakri/dadang)**

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengembilankeputusan, danpengendalian.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh As Syifa Nurillah, Du Muid (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun pada penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai Pengaruh Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap kualitas Laporan Keuangan PemerintahDaerah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mengambil penelitian skripsi dengan judul.

**“PENGARUH KOMPETENSI PENGGUNA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN.”**

* 1. **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasikan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasai masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
2. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi pada SKPD Kabupaten Subang
3. Bagaimana PenerapanSistem Pengendalian Intern pada SKPD Kabupaten Subang
4. Bagaimana Kualitas Laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
5. Seberapa besarPengaruh Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
6. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
7. Seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
8. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
2. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi pada SKPD Kabupaten Subang
3. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada SKPD Kabupaten Subang
4. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
5. Untuk mengetahuibesarnya Pengaruh Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
7. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
8. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Subang
   1. **Kegunaan Penelitian**
      1. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman mengenai Pengaruh Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan guna untuk memenuhi syarat mengikuti Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

1. Bagi mahasiswa

Dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh antara Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara fakta di lapangan dengan permasalahan tersebut dengan ilmu yang diteliti.

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran bagi pihak manajemen perusahaan untuk lebih menjaga dan memperhatikan yang berhubungan dengan Pengaruh Kompetensi pengguna sistem akuntansi keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1. Pihak lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

* + 1. **Kegunaan Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khusus ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada diperusahaan.

* 1. **Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Pengguna Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dilakukan pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Subang.